

ABSTRAK

Indar, “Akuntabilitas Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang” (Di Bimbing oleh Ansyari Mone, dan Hafiz Elfiansya)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dengan mengacu pada indikator Akuntabilitas oleh Dwiyanto yaitu Acuan pelayanan, Tindakan yang di lakukan, dan Seberapa kepentingan jasa. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelayanan Administrasi kependudukan yang di berikan berpedoman dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan, dan juga menciptakan sebuah inovasi layanan yang dapat menutupi keluhan-keluhan pelayanan kependudukan yang ada di Kabupaten Pinrang. 2) Tindakan yang di lakukan dalam akuntabilitas yang transparansi dan efektif telah di laksanakan oleh DUKCAPIL Kabupaten Pinrang dengan mengakses pelayanan berbasis elektronik (*Website*) sebagai hasil kinerja dan tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Pemerintah DUKCAPIL Kabupaten Pinrang, dan anggaran yang bersumber dari APBN pemerintah dan pelaksana biroraksi DUKCAPIL Kabupaten Pinrang. 3) kepentingan pengguna jasa kepentingan masyarakat dan para biroraksi publik terkhusus DUKCAPIL Kabupaten Pinrang berdasarkan visi-misi dan tupoksi dari statholder DUKCAPIL Kabupaten Pinrang, memanfaatkan fasilitas yang ada. Beberapa faktor yang menghambat kami yaitu, regulasi peraturan daerah yang belum di rumuskan seperti standar oprasional prosedur (SOP) dalam perumasan kebijakan untuk teknis pelayanan yang di berikan, dan beberapa pola pikir masyarakat yang kurang memperhatikan.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Pelayanan, Pelayanan Kependudukan.*